

SUARA MERDEKA

Perekat Komunitas Jawa Tengah

KAMIS WAGE, 4 JANUARI 2018
TAHUN 68 NO. 312 ■ TERBIT 28 HALAMAN

1



Jaringan Layanan Media Terlengkap di Jawa Tengah

Rp. 3.999



Waspada Politik Identitas

Oleh Teguh Yuwono

ADA tiga agenda besar yang akan menjadi tren politik pada 2018 ini. Yakni agenda demokratisasi, agenda penguatan ekonomi, dan agenda persatuan kesatuan Indonesia.

Agenda pertama menjadi salah satu persoalan besar bangsa ini adalah berhubungan dengan demokratisasi. Tidak bisa dibantah, demokratisasi di Indonesia saat ini adalah sebuah proses yang sedang berjalan menuju ke titik ideal pada suatu saat. Demokrasi Indonesia mengalami tren positif dan sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan perkembangan demokrasi di negara-negara Asia Tenggara lainnya, khususnya dengan Singapura, Malaysia, ataupun Filipina. *Global Democracy Index* (GDI) berada jauh di atas Singapura, Filipina, bahkan Malaysia. Pada 2016, GDI Indonesia berada pada ranking 48, sementara Singapura ranking 70, Malaysia ranking 65, dan Filipina ranking 50.

Namun, GDI Indonesia yang cukup baik di kawasan Asia Tenggara ini masih menghadapi tantangan demokratisasi yang tidak mudah, khususnya menyangkut kualitas dan budaya demokrasi yang belum benar-benar baik dan mengakar. Kualitas dan budaya demokrasi ini paling sederhana mengukurnya bisa dilihat melalui pemilihan umum (baik pilpres, pileg, pilkada ataupun pilkades).

Pemilu pada 2019 mendatang dan pilkada serentak 2018 masih akan dihantui tiga masalah utama, yakni *money politics*, politik SARA, dan potensi korupsi politik.

(Bersambung hlm 7 Kol 1)

Waspada...

(Sambungan Hal 1)

Money politics masih akan menjadi hantu yang menyeramkan bagi pilkada serentak 2018 dan juga pemilu 2019 nantinya. Sikap permisif baik yang dilakukan oleh para kandidat dan juga pemilih menjadi faktor yang paling sulit untuk menghentikan *money politics*.

Hal ini juga berdampak pada permakluman umum bahwa uang jauh diyakini mampu sebagai sarana ampuh memenangi kompetisi pilkada ketimbang program dan kualitas calon. Lebih tragisnya, suara-suara *money politics* begitu semerbak sejak kandidat berusaha memperoleh rekomendasi politik dari sebuah partai politik. Pada dasarnya hal ini menjadi "falsifikasi politik" yang hampir selalu menyertai dalam setiap kompetisi politik di Indonesia.

Politik SARA, baik secara tersembunyi (implisit) maupun terbuka (eksplisit) menjadi isu-isu pertarungan dalam kompetisi politik, sebagai efek dari pertarungan yang sangat ketat di Pilkada DKI beberapa waktu lalu. Walaupun Samuel P Huntington sudah cukup lama mengingatkan adanya potensi konflik peradaban (*clash of civilization*), nampaknya dominasi politik identitas pada beberapa tahun terakhir ini di Indonesia, merupakan suatu potensi yang sesungguhnya tidak begitu diharapkan, apalagi seiring dengan gencarnya pendidikan politik tentang nasionalisme Indonesia, persatuan dan kebangsaan nasional. Implikasi dari menguatnya politik identitas melalui politik SARA adalah semangat menguatnya *black campaign* ataupun *political hoax* yang akan banyak mewarnai pada panggung politik 2018 dan 2019.

Black campaign melalui SARA merupakan cara yang paling mudah dan murah untuk memobilisasi massa terhadap kesimpulan dan tindakan-tindakan politik tertentu. Mobilisasi

berbasis keyakinan, kesukuan, atau kelompok tertentu menjadi alat yang paling mudah untuk menyerang lawan politiknya. Pertarungan yang ketat pasti berimplikasi dengan potensi digunakannya politik identitas untuk mengalahkan lawan. Padahal, sesungguhnya pertarungan model politik identitas atau politik SARA sesungguhnya telah diatur dalam perundang-undangan bahkan tegas dilarang untuk mendiskreditkan SARA sebagai alat mencari kekuasaan.

Dalam konteks ini, penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu dari jajaran pusat hingga daerah/desa memiliki tugas berat dan harus tetap semangat untuk menghentikan politik primordialisme SARA, menuju kompetisi politik berbasis program dan rasionalitas politik/pemilih.

Dampak dari politik yang mahal karena berbagai modus politik uang adalah potensi merebaknya korupsi politik yang dilakukan oleh para pejabat politik. Apa artinya? Drama lanjutan penangkapan terhadap para pejabat KPK terhadap para pejabat politik ini masih sangat besar peluang terjadi pada 2018 dan 2019. Kebutuhan uang yang sangat besar dan tidak rasional menjadi titik awal potensi munculnya korupsi oleh pejabat politik.

Seharusnya negara ini mulai memikirkan suatu mekanisme sistem (yang mengikat pemilih, kandidat, dan partai politik) sehingga tidak menggunakan uang sebagai instrumen utama politik. Gagasan tentang perlunya kandidat didiskualifikasi jika terbukti melakukan *money politics* merupakan ide awal yang mungkin perlu diwacanakan lebih lanjut agar mampu diimplementasikan dalam sebuah sistem regulasi.

Agenda kedua pada 2018 adalah menyangkut kehidupan ekonomi, dimana keadilan, pemerataan, dan kemakmuran ekonomi belum memihak rakyat kecil. Ekonomi nasional masih didominasi oleh sekelompok

kecil elite ekonomi yang mampu mengendalikan begitu besar ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Perlambatan ekonomi dan kemiskinan yang masih tinggi menjadi agenda besar tantangan ekonomi Indonesia pada 2018. Ekonomi kerakyatan yang didengungkan belum benar-benar menjadi *backbone* (tulang punggung) kehidupan ekonomi nasional Indonesia. Jurang pemisah antara yang kaya dan miskin masih menganga cukup lebar. Ini menjadi tugas nasional para caon pemimpin yang akan diseleksi melalui pilkada serentak 2018 dan juga pemilu 2019 nantinya.

Sementara itu, pada waktu bersamaan Indonesia juga menghadapi agenda dan masalah besar ketiga yakni menyangkut ke-Indonesia-an, kebangsaan, atau nasionalisme. Sekalipun, ke-Indonesia-an, kebangsaan, atau NKRI telah final sebagaimana diproklamkan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 sebagai kelanjutan dari perjuangan Sumpah Pemuda 1928 dengan ikrarnya satu bangsa, satu negara, satu bahasa, Indonesia, ternyata hingga kini masih saja ada kekuatan-kekuatan tersembunyi yang ingin mengganti NKRI ini. Kekuatan-kekuatan yang ingin memecah belah atau bahkan mengganti dasar negara Pancasila adalah kekuatan fanatisisme baik yang berasal dari sayap kiri (yang beraliran komunisme) maupun sayap kanan (yang beraliran fanatisisme agama).

Tidak bisa dibantah, kedua aliran sayap radikal fanatik ini cukup eksis dan berpotensi berkembang secara luas dan berpeluang merongrong ideologi nasional Pancasila. Hal ini menjadi tantangan berat pemerintahan kini dan mendatang, khususnya para pemimpin negara yang akan dipilih melalui pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019.

Pilgub Jateng 2018

Terdapat spekulasi bahwa pertarungan politik identitas yang terjadi di DKI Jakarta pada

beberapa waktu yang lalu akan berpotensi terjadi di pilgub Jawa Tengah. Walaupun potensi itu ada, dalam pandangan akademik penulis, peluang itu sangat kecil. Terdapat tiga alasan mengapa pilkada DKI Jakarta berbeda dan sulit diulang di Jawa Tengah. Pertama, tokoh yang diusung di Jakarta dengan di Jateng berbeda. Di Jawa Tengah, tidak berpotensi seperti kasus Ahok, karena dari aspek identitas dan kesamaan suku dan agama terjadi. Suku dan agama yang sama tidak berpotensi digoreng menjadi isu agama yang manjur sebagaimana di Jakarta. Politik SARA tidak akan mampu berjalan efektif di Jawa Tengah. Kedua, karakteristik pemilih yang tradisional sangat sulit berpindah pilihan sebagaimana yang di Jakarta. Pemilih di Jakarta lebih cair dan terbuka terhadap perubahan pilihan, tidak dengan Jateng yang pemilihnya tradisional dan lebih loyal pada garis partai. Ketiga, dominasi PDIP sebagai partai terbesar di Jawa Tengah yang didukung oleh pemilih loyal yang tidak mudah berubah tidaklah gampang dikalahkan sebagaimana di Jakarta.

Terhadap pertanyaan mengapa pilgub Jateng lebih adem ayem dibandingkan dengan pilgub Jatim dan Jabar, terdapat tiga analisis sebagai berikut. Pertama, di Jabar lebih ramai karena tidak ada lagi *incumbent* yang bisa maju. Sementara di Jawa Tengah *incumbent* gubernur masih bisa maju lagi, sehingga tidak banyak tokoh yang siap bertanding melawan dominasinya. Kedua, tidak tersedia tokoh yang cukup kuat dan populer untuk menandingi kader PDIP yang ada di Jawa Tengah, khususnya *incumbent* Ganjar Pranowo. Ketiga, loyalitas pemilih yang ditandai dengan jumlah pemilih PDIP yang loyal (mencapai sekitar 35 persen) menunjukkan penguatan terhadap tradisi Jateng sebagai kandang Banteng.

Pertanyaan lebih lanjut adalah apakah dengan dominasi PDIP

dan kuatnya *incumbent* Gubernur Ganjar Pranowo sudah berarti pilkada Jateng selesai? Apakah *incumbent* tidak bisa dikalahkan? Jawaban atas hal ini adalah bahwa peluang *incumbent* menang kembali di hampir banyak negara di dunia adalah 80 persen. Itu artinya tetap saja masih ada peluang untuk mengalahkan *incumbent* Gubernur Jateng. Tetapi dibutuhkan figur lawan yang sangat kuat dan populer diikuti dengan soliditas dan loyalitas yang besar dari partai penguasanya yang didukung dengan sumber daya yang memadai. Didukung kemudian dengan pertarungan *head to head* melawan PDIP. Jika pasangan yang diusulkan oleh partai politik lebih dari dua pasangan, maka pastilah PDIP Jateng yang akan banyak diuntungkan sebagaimana pada Pilgub Jateng 2013 lalu. Kompetisi akan semakin strategis karena Pilgub Jateng sesungguhnya merupakan *warming up* menuju pilpres dan pileg 2019.

Jadi, seperti apakah figur-figur kandidat yang akan bertarung di Pilgub Jateng mendatang? Mampukah mereka berkompesi secara seimbang? Mampukah mereka mengalahkan tradisi (atau mitos) Jateng sebagai kandang banteng? Apakah tradisi akan berlanjut? Atau apakah perubahan akan terjadi dengan mematahkan tradisi atau mitos "kandang banteng" tersebut?

Kita tunggu peta politik selanjutnya, dalam waktu dekat ini, karena parpol sudah harus segera mendaftarkan pasangan gubernur dan wakil gubernur pada 8-10 Januari 2018 mendatang.

Tetapi, apa pun yang terjadi, sekeras apa pun kompetisinya, rakyat Jateng tetap berharap konduktivitas dan kesejahteraan rakyat sebagai muara akhir dari seluruh proses politik hingga pemilu 2019 mendatang. (67)

— Dr Teguh Yuwono MPol-Admin - Pakar Politik dan Pemerintahan, Kaprodi Magister Ilmu Politik (MIP) FISIP Undip Semarang.